

## SKRIPSI

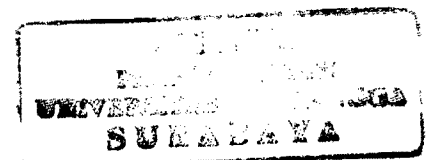
# PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN



Per Kb 105  
Dar  
9

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**



**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI  
PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

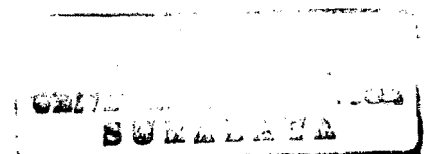
  
**Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131653462**

**Penyusun,**

  
**Nur Darmawati**  
**Nim : 030111097 U**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai perjanjian lisensi paten dapat ditemukan dalam Bagian Kedua Bab V tentang Lisensi yaitu tepatnya pada Pasal 69 hingga Pasal 73 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pasal-pasal ini mengatur dengan tegas tentang Lisensi Paten. Sedangkan konsepsi utama mengenai perjanjian tidak diatur dalam pasal-pasal tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi acuan adalah BW (KUHPerduta). Pada pasal 1313 BW mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, artinya dalam perjanjian orang yang satu dengan yang lain saling terkait. Perbuatan para pihak untuk mengadakan perjanjian ini di dasari oleh adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW). Sebuah asas yang mengetengahkan suatu prinsip bahwa para pihak dapat membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya. Hal ini pula yang diadopsi oleh para pihak yang ingin membuat perjanjian lisensi. Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW jo Pasal 1338 BW, para pihak dapat membuat perjanjian lisensi paten dimana dari perjanjian perjanjian pemberian lisensi tersebut akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pemberi dan penerima lisensi. Namun

perjanjian ini juga tidak boleh menyimpangi Pasal 69 hingga Pasal 73 sebagai *lex specialis* dari pengaturan mengenai lisensi paten.

- b. Upaya hukum bagi penerima lisensi paten yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi paten dapat ditempuh melalui dua proses penyelesaian perselisihan. Adapun proses yang pertama dapat dilakukan melalui proses litigasi yang meliputi gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, selanjutnya proses yang kedua adalah melalui proses non litigasi yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

## 2. Saran

Selanjutnya dari yang telah saya bahas dalam skripsi saya ini, maka saya ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Beranjak dari eksistensi regulasi mengenai perjanjian lisensi paten yang ada saat ini maka saya menyarankan perlu dibuat suatu peraturan mengenai perjanjian lisensi paten yang lebih intensif dan rinci dalam pembahasannya tentang perjanjian lisensi paten.
- b. Jika dalam suatu kerjasama tersebut diketemukan adanya suatu kendala atau konflik hendaknya diselesaikan melalui jalan damai diantara para pihak melalui proses non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dengan upaya tersebut apabila terjadi sengketa, para pihak tetap dapat berhubungan baik dan dimungkinkan dapat menjalin kerjasama dimasa yang akan datang sebagai mitra yang saling menguntungkan.